

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Sejarah Keuangan Negara.....	1
1.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara	3
1.3 Dasar Hukum Keuangan Negara.....	4
1.4 Sistem Pengelolaan Keuangan Negara.....	5
1.5 Manajemen Kekayaan Negara.....	7
1.6 Paradigma Baru Keuangan Publik	12
Bab 2 Organisasi Pemerintah dan Karakteristiknya	21
2.1 Fungsi Manajemen, Tujuan dan Hubungannya dengan Manajemen Keuangan	21
2.2 Karakteristik Organisasi Pemerintahan	23
2.3 Lingkungan Organisasi Pemerintahan	24
2.4 Pelaporan Keuangan Organisasi Pemerintahan ...	29
2.5 Persamaan dan Perbedaan Antara Organisasi Nonprofit dengan Organisasi Komersial	32
Bab 3 Keuangan Negara dan Pengelolaannya.....	35
3.1 Pengertian Keuangan Negara	35

3.2	Pengurusan Keuangan Negara.....	38
3.3	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara.....	40
3.4	Asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	43
3.5	Pengertian Pengeluaran Negara dan Fungsi Anggaran	45
3.6	Bentuk-bentuk Anggaran	47
3.7	Jenis Anggaran.....	49
3.8	Keuangan Daerah, Ruang Lingkup dan Asas-asas	51
Bab 4	Struktur dan Klasifikasi Anggaran Negara	57
4.1	Unsur Pokok Anggaran Negara	57
4.2	Struktur Anggaran	58
4.3	Komponen APBN-RI	60
4.4	Struktur APBN Indonesia	62
4.5	Klasifikasi Anggaran.....	64
4.6	Perencanaan dan Penganggaran Nasional	68
Bab 5	A P B N.....	77
5.1	Pengertian APBN	77
5.2	Fungsi APBN	79
5.3	Landasan Hukum	82
5.4	Penyusunan APBN.....	83
5.5	Persiapan Penyusunan APBN.....	84
5.6	Prinsip Penyusunan APBN	86
5.7	Proses APBN Pra UU No. 17/2003	87
Bab 6	Pelaksanaan APBN.....	95
6.1	Pelaksanaan Anggaran	95
6.2	Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN	97
6.3	Proses APBN Pasca UU No. 17/2003.....	98
6.4	APBN Sumber Pembiayaan Kegiatan Pemerintah	101
6.5	Pengurusan Umum	103
6.6	Pengurusan Khusus.....	106
Bab 7	A P B D.....	115
7.1	Pengertian dan Karakteristik APBD	115

7.2	Prinsip Penyusunan APBD	116
7.3	Penyusunan Pendapatan Daerah.....	118
7.4	Penyusunan Belanja Daerah	118
7.5	Penyusunan Pembiayaan Daerah	129
Bab 8	Akuntansi Pemerintahan	141
8.1	Pengertian dan Fungsi Akuntansi	141
8.2	Bidang-Bidang Akuntansi Berdasarkan Bentuk Kelembagaannya.....	143
8.3	Bidang-Bidang Akuntansi	143
8.4	Sistem Manajemen Keuangan Negara	147
8.5	Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	149
8.6	Pelaporan Keuangan Sektor Publik.....	150
Bab 9	APBD: Pengesahan, Pelaksanaan dan Perubahan	159
9.1	Anggaran Berbasiskinerja.....	159
9.2	Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah.....	161
9.3	Pengesahan APBD	163
9.4	Perubahan APBD	172
9.5	Pelaksanaan APBD	175
Bab 10	Pengurusan Keuangan Negara.....	181
10.1	Pengantar.....	181
10.2	Pengurusan Keuangan Negara yang Langsung Oleh Pemerintah	182
10.3	Pengertian Bendaharawan.....	186
Bab 11	Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Kinerja Bendaharawan	203
	Pengantar	203
11.1	Dasar Hukum Pertanggungjawaban	203
11.2	Pertanggungjawaban Bendaharawan Penerima ...	204
11.3	Pertanggungjawaban Bendaharawan Rutin/Proyek	205
11.4	Pertanggungjawaban Bendaharawan Umum	206

11.5	Pertanggungjawaban Pengurusan Umum.....	208
11.6	Kinerja Bendaharawan	211
Bab 12	Dana dan Akuntansi Dana	219
12.1	Pengertian Dana dan Akuntansi Dana.....	219
12.2	Klasifikasi Kesatuan Dana	221
12.4	Akuntansi Dana	226
12.5	Jenis-jenis Dana	229
12.6	Persamaan dan Perbedaan Konsep Akuntansi Pemerintahan dan Komersial	233
12.7	GASB.....	237
12.8	Prinsip Akuntansi dan Standar Akuntansi di Sektor Pemerintah.....	239
Bab 13	Pengawasan Keuangan Pemerintah	245
13.1	Pengertian dan Tujuan Pengawasan Keuangan Negara	245
13.2	Fungsi Pengawasan Keuangan Negara	247
13.3	Landasan Kebijakan Pengawasan	248
13.4	Jenis-Jenis Pengawasan	249
13.5	Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Negara	254
13.6	Badan Pemeriksa Keuangan	254
13.7	Temuan BPK untuk Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	256
Bab 14	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Manajemen Sektor Publik	269
14.1	Manajemen Anggaran.....	269
14.2	Pengukuran Kinerja.....	271
14.3	Manajemen Stratejik Sektor Publik	274
14.4	Anggaran Sektor Publik.....	278
Bab 15	Standar Akuntansi Pemerintahan.....	289
15.1	Pengertian dan Fungsi SAP.....	289
15.2	Landasan Hukum.....	292
15.3	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).....	295

15.5 Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat	299
Daftar Pustaka	311
Tentang Penulis	317

1.1 LATAR BELAKANG SEJARAH KEUANGAN NEGARA

Ilmu keuangan negara lahir dari wilayah politik, yaitu terkait pada masalah hubungan antara dua lembaga politik, yaitu legislatif dan eksekutif. Bila diamati, wilayah tersebut merupakan wilayah tata negara. Oleh sebab itu, studi tentang ilmu keuangan negara, disoroti dari aspek politik maupun hukum tata negara. Menjadi permasalahan utama pada saat 'Pemerintah meminta dana pada rakyatnya' adalah bagaimana membagi beban kepada rakyat, maka lahirlah konsep keadilan dalam pembagian beban pajak.

Dalam perjalanannya, seorang ahli ekonomi Jerman (Adolf Wagner) mengamati perilaku pengeluaran negara secara empiris tidak pernah turun, tetapi justru setiap tahun selalu meningkat. Fenomena ini terjawab, setelah melihat bahwa kebutuhan negara untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat selalu meningkat karena berbagai alasan, misalnya alasan sosial, keamanan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil kajian dalam berbagai studi pustaka, melahirkan dalil yaitu: *Law of ever increasing government expenditures*. Masalah-masalah keuangan negara tidak lagi semata-mata pada ma-